

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI DAN PENGAWASAN
PIUTANG PADA PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(PNPM) MANDIRI PERDESAAN
KECAMATAN TELUK SEBONG**

SKRIPSI

OLEH

**ULFAH KHAIRINA
NIM : 14622296**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2021**

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI DAN PENGAWASAN
PIUTANG PADA PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(PNPM) MANDIRI PERDESAAN
KECAMATAN TELUK SEBONG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

OLEH

ULFAH KHAIRINA
NIM : 14622299

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2021**

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI DAN PENGAWASAN PIUTANG
PADA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(PNPM) MANDIRI PERDESAAN KECAMATAN TELUK SEBONG**

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh

NAMA : ULFAH KHAIRINA
NIM : 14622296

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,



Hendy Satria, S.E., M.Ak.
NIDN. 1015069101 / Lektor

Pembimbing Kedua,



Ranti Utami, S.E., M.Si., Ak. CA
NIDN. 1004117701 / Lektor

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Hendy Satria, S.E., M.Ak.
NIDN. 1015069101 / Lektor

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI DAN PENGAWASAN PIUTANG
PADA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(PNPM) MANDIRI PERDESAAN KECAMATAN TELUK SEBONG**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

NAMA : ULFAH KHAIRINA
NIM : 14622296

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal Dua Puluh
Empat Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua



Hendy Satria, S.E., M.Ak.
NIDN. 1015069101 / Lektor

Sekretaris



Tommy Munaf, S.E., M.Ak.
NIDN. 1016048202 / Asisten Ahli

Anggota,



Maryati, S.P., M.M.
NIDN. 1007077101 / Asisten Ahli

Tanjungpinang, 24 Agustus 2021
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang,
Ketua,




Chairy Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA
NIDN. 1029127801 / Lektor

PERNYATAAN

Nama : Ulfah Khairina
Nim : 14622296
Tahun Angkatan : 2014
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,23
Program Studi / Jenjang : Akuntansi / Strata I
Judul Skripsi : Analisis Perlakuan Akuntansi dan Pengawasan
Piutang Pada Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kecamatan
Teluk Sebong

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan bukan hasil rekayasa maupun karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata dikemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 24 Agustus 2021

Penyusun


ULFAH KHAIRINA
NIM. 14622296

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan ridha-Mu ya Allah. Amanah ini telah selesai, salah satu jihad yang mulia mencari ilmu. Satu Cita telah ku gapai, namun tidak membuatku lalai, melainkan titik awal langkah menjalankan jihad lainnya dengan bekal amanah gelar yang ku terima.

Kupersembahkan karya kecil ini untuk:

- Ayahku Khairuddin
- Ibuku Isna Derita
- Adikku Usni Adetia Khairina

Yang tidak pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan

HALAMAN MOTTO

“Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu”
(QS. Ath-Thalaq: 2-3).

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya”
(QS. Al-Baqarah: 286)

“Dan barangsiapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh, Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam”
(QS. Al-'Ankabut Ayat 6)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu wata'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan serta diberikan keberkahan akan ilmu dan pengetahuan sehingga penulis tetap dapat segala ikmat yang diberikan. Serta tidak lupa penulis hanturkan Shalawat beriring salam kepada Nabi Besar Muhammad Shallallahu'alaihi wasallam.

Syukur alhamdulillah, berkat keridhoan-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Analisis Perlakuan Akuntansi dan Pengawasan Piutang Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kecamatan Teluk Sebong" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan pikiran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, SE. M.Ak. Ak. CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, SE. M.Si. Ak. CA selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang dan sekaligus sebagai pembimbing II yang telah bersedia membimbing, memberikan tambahan

ilmu dan pengarahan atas setiap kesulitan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Sri Kurnia, SE. Ak. M.Si. CA selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Ir. Imran Ilyas, MM. selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Bapak Hendy Satria, SE. M.Ak. selaku Ketua Program Studi Strata I Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang dan sekaligus sebagai pembimbing I yang telah bersedia membimbing, memberikan tambahan ilmu dan solusi atas setiap kesulitan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Salwati selaku Ketua Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kecamatan Teluk Sebong yang telah memberikan kesempatan dan bersedia memberikan informasi-informasi yang diperlukan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar yang telah mendidik penulis selama menjadi mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
8. Bapak dan Ibu Staff Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
9. Toga, Leslie, Febri dan Wiwid yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya serta selalu siap sedia menyemangati dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman yang selalu memberikan semangat agar penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Dan pihak-pihak terkait dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dan mendukung dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak umumnya dan bagi mahasiswa pendidikan pada khususnya.

Tanjungpinang, 24 Agustus 2021

Penulis

ULFAH KHAIRINA

NIM. 14622296

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Batasan Masalah	8
1.4. Tujuan Penelitian.....	9
1.5. Kegunaan Penelitian	9
1.5.1. Kegunaan Teoritis.....	9
1.5.2. Kegunaan Praktis	9
1.6. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Tinjauan Teori	12
2.1.1. Akuntansi	12
2.1.1.1. Pengertian Akuntansi.....	12
2.1.1.2. Tujuan Akuntansi	13
2.1.1.3. Manfaat Akuntansi	15

2.1.2.	Piutang	16
2.1.2.1.	Pengertian Piutang.....	16
2.1.2.2.	Klasifikasi Piutang.....	18
2.1.2.3.	Metode Pencatatan Piutang.....	20
2.1.2.4.	Kebijakan Pengumpulan Piutang.....	21
2.1.2.5.	Teknik Pengumpulan Piutang.....	22
2.1.2.6.	Faktor-Faktor Mempengaruhi Piutang	23
2.1.3.	Perlakuan Akuntansi Piutang.....	24
2.1.3.1.	Pengakuan Piutang	24
2.1.3.2.	Pengukuran/Penilaian Piutang	27
2.1.3.3.	Penyajian dan Pelaporan Piutang.....	29
2.1.3.4.	Kerugian Piutang Tak Tertagih	32
2.1.3.5.	Estimasi Piutang Tak Tertagih	33
2.1.3.6.	Pengendalian Piutang	35
2.2.	Kerangka Pemikiran	36
2.3.	Penelitian Terdahulu.....	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		42
3.1.	Jenis Penelitian	42
3.2.	Jenis Data.....	42
3.3.	Teknik Pengumpulan Data	43
3.4.	Teknik Pengolahan Data.....	45
3.5.	Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		51
4.1.	Hasil Penelitian.....	51
4.1.1.	Gambaran Umum PNPM Mandir Pedesaan Teluk Sebong.....	51
4.1.1.1.	Sejarah PNPM Mandir Pedesaan Teluk Sebong	51
4.1.1.2.	Visi dan Misi PNPM Mandir Pedesaan Teluk Sebong....	52
4.1.1.3.	Tujuan PNPM Mandir Pedesaan Teluk Sebong	53
4.1.1.4.	Struktur PNPM Mandir Pedesaan Teluk Sebong	54
4.1.1.5.	Aktivitas PNPM Mandir Pedesaan Teluk Sebong.....	56

4.1.2. Prosedur Pemberian Kredit.....	57
4.1.3. Penagihan.....	59
4.1.4. Penetapan dan Pengendalian Yang Layak	60
4.2. Pembahasan	63
4.2.1. Pengakuan Piutang PNPM Mandir Pedesaan Teluk Sebong.....	63
4.2.2. Penilaian Piutang PNPM Mandir Pedesaan Teluk Sebong	66
4.2.3. Penyajian Piutang PNPM Mandir Pedesaan Teluk Sebong.....	71
4.2.4. Pengendalian Piutang PNPM Mandir Pedesaan Teluk Sebong.....	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	77
5.1. Kesimpulan.....	77
5.2. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
1	Ayat Jurnal Mengakui Piutang Atas Penjualan Barang/Jasa	25
2	Ayat Jurnal Untuk Mencatat Pembayaran Piutang	26
3	Karakteristik Umur Piutang	34
4	Kondisi Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan 2019	69
5	Kondisi Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan 2020	70
6	Neraca 2019.....	72
7	Neraca 2020.....	73

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Tabel	Halaman
1	Kerangka Pemikiran.....	37

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran
Lampiran 1.	Pedoman Wawancara
Lampiran 2.	Data Pendukung dan Dokumentasi
Lampiran 3.	Surat Keterangan Objek Penelitian
Lampiran 4.	Persentase Plagiat

ABSTRAK

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI DAN PENGAWASAN PIUTANG PADA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN KECAMATAN TELUK SEBONG

Ulfah Khairina. 14622296. S1 Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Pembangunan Tanjungpinang. Email: ulfahkhairina@gmail.com

Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui penerapan perlakuan akuntansi dan pengawasan piutang pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kecamatan Teluk Sebong.

Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, studi lapangan dan hasil wawancara. Data-data yang telah diperoleh selanjutnya dibandingkan dengan teori yang relevan sehingga dapat diambil suatu kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Teluk Sebong dalam melakukan perlakuan akuntansi piutangnya belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, karena dalam melakukan penilaian piutang tidak menggunakan sistem penyisihan yang jelas bertentangan dengan Standar Akuntansi Keuangan yang memakai sistem penyisihan terhadap piutang tak tertagih. Selanjutnya, dalam melakukan pencatatan pendapatan jasa masih terdapat kesalahan sehingga akan mempengaruhi besarnya laba rugi.

Hasil pembahasan yang dilakukan dapat diketahui bahwa perlakuan akuntansi dan pengawasan piutang pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kecamatan Teluk Sebong belum berperan secara optimal, hal ini dikarenakan masih terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pengawasan piutang tak tertagih sehingga menghasilkan selisih yang tidak menguntungkan pada laporan laba rugi dan seharusnya PNPM Mandiri Pedesaan melakukan koreksi.

Kata kunci : perlakuan akuntansi, pengawasan piutang, PNPM

Dosen Pembimbing I : Hendy Satria, SE. M.Ak.

Dosen Pembimbing II : Ranti Utami, SE. M.Si. Ak. CA

ABSTRACT

ANALYSIS OF ACCOUNTING TREATMENT AND SUPERVISION OF RECEIVABLES IN THE NATIONAL COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM (PNPM) MANDIRI RURAL SUB-DISTRICT TELUK SEBONG

Ulfah Khairina. 14622296. S1 *Accounting*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang. Email: ulfahkhairina@gmail.com

The purpose of this study was to determine the application of accounting treatment and supervision of receivables in the National Program for Community Empowerment (PNPM) of Rural Mandiri, Teluk Sebong District.

The method used in this research is a qualitative descriptive method. The types of data used are primary data and secondary data obtained through library research, field studies and interviews. The data that has been obtained is then compared with the relevant theory so that a conclusion can be drawn.

The results of this study indicate that PNPM Mandiri Pedesaan, Teluk Sebong District, in carrying out the accounting treatment of its receivables has not been in accordance with Financial Accounting Standards, because in assessing receivables it does not use an allowance system which is clearly contrary to Financial Accounting Standards which uses an allowance system for bad debts. Furthermore, in recording service revenue there are still errors that will affect the amount of profit and loss.

The results of the discussion carried out can be seen that the accounting treatment and supervision of receivables in the National Program for Community Empowerment (PNPM) Rural Mandiri, Teluk Sebong District has not played an optimal role, this is because there are still irregularities in the implementation of the supervision of bad debts resulting in an unfavorable difference in the report. profit and loss and PNPM Mandiri Rural should make corrections.

Keyword : accounting treatment, accounts receivable control, PNPM

Supervisor I : Hendy Satria, SE. M.Ak.

Supervisor II : Ranti Utami, SE. M.Si. Ak. CA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan semakin banyaknya usaha yang saling merebut pasar pada masa kini, maka persaingan adalah suatu yang tidak terelakkan lagi. Hal tersebut diperburuk dengan kondisi prekonomian Indonesia yang mengalami krisis. Rendahnya sumber daya manusia, masih belum bisa mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada, sehingga sumber daya alam yang kita miliki dan kita punya belum dapat dimanfaatkan atau diolah sendiri. Hal ini disebabkan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, sehingga menyebabkan masyarakat tidak dapat meningkatkan kesejahteraan.

Peran pemerintah sangat diperlukan untuk membantu membangun perekonomian rakyat, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemerintahan juga telah mencanangkan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang keseluruhan bagiannya meliputi aspek kehidupan masyarakat, dalam hal ini dapat dikatakan merupakan tugas pemerintah untuk melaksanakan tujuan pembangunan nasional.

Untuk itu, pemerintah telah mengadakan sebuah program yakni Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan. Melalui program ini, masyarakat kalangan menengah ke bawah bisa mendapatkan pinjaman modal untuk mendirikan atau melanjutkan usaha mereka sehingga dapat terwujud suatu masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Dengan adanya program PNPM, maka diharapkan individu miskin mempunyai kekuatan (*power*) dalam memberdayakan kehidupan mereka. Dalam hal pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri, Presiden mengharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena program itu langsung dari usulan masyarakat, sehingga lebih tepat, lebih baik dan tidak ada kebocoran.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor dan pemerintah daerah.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan adalah program pemberdayaan masyarakat miskin untuk secara proaktif berpartisipasi dalam pembangunan agar mereka dapat lebih menjalani kehidupan

yang lebih baik, dan memprioritaskan tindakan pemecahan masalah sendiri, solidaritas dan kerja sama dalam komunitas itu sendiri.

Tujuan PNPM Mandiri yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi masyarakat secara mandiri. Sejalan dengan tujuan tersebut maka dunia usaha pun akan termotivasi untuk semakin berkembang dengan munculnya usaha-usaha pedesaan sehingga mereka mendapatkan peluang kerja yang sama, meningkatkan usaha dan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Jika kesejahteraan keluarga tercapai maka kesejahteraan daerah pun akan meningkat, baik yang bergerak di bidang jasa maupun industri, terutama industri rumah tangga dan industri kecil.

Tercapainya tujuan tidak hanya tergantung pada peralatan modern, sarana dan prasarana yang lengkap, tetapi justru lebih tergantung pada manusia yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, pengurus PNPM yang berkualitas adalah pengurus yang mampu melaksanakan pekerjaannya dan mampu memberikan hasil kerja yang baik atau mempunyai produktivitas tinggi. Karena pada dasarnya keberhasilan organisasi/lembaga PNPM secara keseluruhan adalah kontribusi dari hasil kerja pengurus PNPM.

Perubahan PNPM merupakan perubahan yang direncanakan. Perubahan-perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki suatu perubahan dinamakan *agent of change*, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Peran

PNPM disini merupakan *agent of change* yang mengorganisasi masyarakat yang secara mandiri berusaha meningkatkan kesejahteraannya. Namun, kurang adanya pemahaman masyarakat tentang konsep pemberdayaan dan analisis tentang permasalahan yang dihadapi membuat mereka kurang kritis dalam penentuan program yang dilakukan.

Dalam melaksanakan hal itu, PNPM mempunyai dua program yang menjadi inti dari aktivitas PNPM Mandiri tersebut. Yang pertama yaitu program yang bersifat prasana, pada program ini PNPM Mandiri pedesaan memberikan bantuan dana kepada pihak desa yang ada di kecamatan-kecamatan yang tersebar diseluruh Indonesia. Dana ini merupakan dana yang bersifat hibah ke desa-desa tersebut, yang gunanya untuk membangun prasarana yang akan membantu terlaksananya desa yang mandiri. Sedangkan program kedua disebut dengan SPP (Simpan Pinjam Perempuan), dalam hal ini PNPM Mandiri memberikan bantuan kredit sebagai modal usaha kepada masyarakat yang akan mendirikan atau menjalankan usaha. Dengan demikian, PNPM memberikan kredit usaha kecil dan menengah sehingga akan menimbulkan piutang.

Piutang yang terdapat pada PNPM Pedesaan Mandiri Kecamatan Teluk Sebong hanya terdiri dari piutang simpan pinjam. Simpan pinjam ini hanya dikhususkan untuk perempuan saja. Piutang yang terdapat pada PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Teluk Sebong ini digolongkan pada satu perkiraan saja yaitu piutang simpan pinjam. Piutang simpan pinjam pada PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Teluk Sebong ini adalah piutang yang berasal dari kegiatan utama PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Teluk Sebong yaitu pemberian pinjaman

atau penyaluran dana secara kredit kepada masyarakat. Pinjaman kredit ini selanjutnya menimbulkan perkiraan piutang simpan pinjam. Simpan pinjam ini merupakan salah satu pos yang berpengaruh dan besar dalam PNPM Mandiri. Dalam hal ini, terdapat beberapa poin penting yang menjadi permasalahan dari PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Teluk Sebong ini dalam menyajikan piutang dalam laporan keuangannya.

PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Teluk Sebong dalam melaporkan piutang di neraca pada akhir periode sebesar jumlah brutonya saja dan tidak menentukan taksiran jumlah yang tak tertagih atas piutang tersebut, atau dengan kata lain PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Teluk Sebong menggunakan metode penghapusan langsung untuk piutang tak tertagihnya.

Piutang PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tambang disajikan sebesar jumlah bruto piutang, hal ini menyimpang dari standar akuntansi keuangan yang mana piutang disajikan dengan nilai bersihnya di neraca dan diikuti dengan penyisihan piutang yang diragukan atau taksiran jumlah yang tidak dapat diterima, atau dengan kata lain Standar Akuntansi Keuangan menggunakan metode penyisihan.

Disamping itu penggunaan metode penghapusan langsung juga tidak memenuhi prinsip *matching* Standar Akuntansi Keuangan yang menyatakan bahwa beban diakui dalam laporan rugi laba atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dengan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Dengan menggunakan metode penghapusan langsung akan menyebabkan penyimpangan atas laporan rugi laba dan neraca PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Teluk

Sebong karena piutang tak tertagih tidak dilaporkan bersamaan dengan periode terjadinya pemberian pinjaman. Selain itu, PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Teluk Sebong juga tidak mengestimasi piutang yang tidak dapat tertagih setiap periode. Mengestimasi jumlah piutang yang tak tertagih dengan menggunakan *Aging Schedule* berguna untuk mengetahui berapa besar piutang yang sudah jatuh tempo dan berapa besar piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih lagi serta akan diketahui besarnya kerugian yang diakibatkan oleh tidak tertagihnya piutang, hal ini akan membantu untuk pengambilan keputusan dan pengendalian piutang agar periode berikutnya piutang yang tak tertagih bisa diminimalisir sehingga akan meningkatkan laba bagi perusahaan.

Selanjutnya, dalam melakukan pencatatan pendapatan jasa bunga dari pengembalian pinjaman oleh anggota SPP yang diberikan pinjaman kredit juga mengalami kesalahan, jumlah yang dilaporkan pada laporan laba rugi perusahaan dengan jumlah yang tertera pada laporan perkembangan SPP PNPM Mandiri Pedesaan tidak sama. Hal ini bisa mempengaruhi jumlah laba rugi yang dihasilkan oleh PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Teluk Sebong. Untuk itu, seharusnya PNPM Mandiri melakukan koreksi terhadap pencatatan jumlah pendapatan jasa bunga pinjaman yang diterima. PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Teluk Sebong memberikan pinjaman dengan prosedur sebagai berikut :

1. Pinjaman kredit hanya boleh diberikan kepada kelompok perempuan yang disebut dengan SPP untuk melukan usaha atau kegiatan perekonomian.
2. Setiap pinjaman kredit yang terjadi harus mendapat persetujuan oleh bendahara.

3. Jangka waktu pelunasan dengan rentang waktu 12-18 bulan dengan suku bunga tetap mulai dari 12%-18%.
4. Setiap memberikan pinjaman kredit tidak mengadakan agunan sebagai jaminan atas pinjaman, akan tetapi hanya menyisakan 10% dari jumlah yang dipinjam oleh anggota.

Berdasarkan poin-poin di atas, maka dapat dikatakan PNPM Mandiri Kecamatan Teluk Sebong masih lunak dalam memberikan persyaratan pinjaman kredit. Ini dibuktikan dengan tidak adanya agunan dalam pemberian pinjaman kredit kepada masyarakat yang ingin meminjam. Sedangkan dalam melakukan pengawasan dan penagihan atas piutang PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Tambang kurang dijalani dengan baik, sehingga banyak terdapat piutang yang tidak dapat tertagih yang jumlahnya material. Hal ini dapat mengakibatkan besarnya beban piutang tak tertagih dan mempengaruhi besarnya laba rugi yang diperoleh. Apabila prosedur pengawasan dan penagihan piutang dijalankan dengan seksama dan baik, maka kemungkinan besar piutang dapat tertagih akan terealisasi dalam jumlah yang relatif besar. Keadaan ini akan meningkatkan keuntungan dan akan meningkatkan produktifitas dana pinjaman tersebut.

Penyajian piutang simpan pinjam di neraca digolongkan sebagai aktiva lancar karena jangka waktu penagihannya tak lebih dari satu periode normal akuntansi atau tidak lebih dari satu tahun. Penyajian piutang simpan pinjam di neraca oleh PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Teluk Sebong disajikan pada kelompok aktiva lancar yang ditempatkan setelah kas dan bank. Hal ini sudah benar karena waktu pelunasannya tidak lebih dari satu periode normal atau lebih

dari satu tahun. Piutang PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Teluk Sebong diberi waktu pelunasannya sesuai dengan kesepakatan antara pihak PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Teluk Sebong dengan peminjam dengan tingkat bunga yang telah ditentukan berdasarkan lama pinjaman tersebut.

PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tambang berada di Kecamatan Teluk Sebong yang kegiatannya menyalurkan dana pembangunan desa dan pemberian pinjaman kredit untuk masyarakat. Berdasarkan kegiatan tersebut maka dapat menimbulkan piutang. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dalam penelitian ini dengan judul **“Analisis Perlakuan Akuntansi dan Pengawasan Piutang Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kecamatan Teluk Sebong”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, untuk dapat mengarahkan serta memudahkan dalam penelitian ini agar terfokus dan sistematis maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Apakah penerapan akuntansi piutang pada PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Teluk Sebong sesuai dengan PSAK yang meliputi: pengukuran piutang, pencatatan piutang, dan penyajiab piutang di neraca?”.

1.3 Batasan Masalah

Dalam pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini, agar penelitian ini tidak meluas, lebih fokus dan terarah, maka penelitian ini

memiliki batasan masalah pada ruang lingkup kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ingin diteliti oleh penulis, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan perlakuan akuntansi piutang serta pengawasan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kecamatan Teluk Sebong telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan prosedur yang berlaku umum.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dan tambahan informasi yang diperlukan untuk pengembangan pengetahuan lebih lanjut terutama mengenai perlakuan akuntansi dan pengawasan piutang pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan yang telah sesuai dengan prosedur dan berlaku umum.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi PNPM Mandiri

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan untuk pengembangan dan penyempurnaan mengenai perlakuan akuntansi dan pengawasan piutang pada PNPM Mandiri Pedesaan.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan kepustakaan bagi mahasiswa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta pemahaman mendalam berkaitan dengan perlakuan akuntansi dan pengawasan piutang pada PNPM Mandiri Pedesaan.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan secara teoritis yang didapatkan selama proses studi maupun bersumber dari literatur-literatur yang relevan dengan penerapannya dalam praktik.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, adapun sistematika penulisan dapat diperincikan satu per satu yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah yang mendasari penelitian ini, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menerangkan tentang uraian dari teori-teori yang relevan digunakan di dalam mendukung pembahasan masalah penelitian, kerangka pemikiran yang menggambarkan penelitian ini, dan penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menyajikan tentang jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, analisis dan pengolahan data penelitian, serta hasil penelitian dan pembahasan masalah yang dilakukan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian terakhir dari laporan penelitian ini, berisikan tentang kesimpulan pada hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi berasal dari kata “*to account*” yang salah satu artinya adalah menghitung. Akuntansi pada dasarnya berhubungan dengan informasi keuangan secara kuantitatif yang berguna untuk mengambil keputusan. Semakin profesional akuntan dalam proses pembuatan laporan keuangan atau siklus akuntansinya, maka akan semakin baik juga keputusan yang akan diambil oleh pihak manajemen untuk kelangsungan hidup suatu perusahaan.

Akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pengesahan, pengukuran, pengakuan, pengklarifikasian, penggabungan, peringkasan, dan penyajian data keuangan dasar (bahan olah akuntansi) yang terjadi dari kejadian-kejadian, transaksi-transaksi, atau kegiatan operasi suatu unit organisasi dengan cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan (Suwardjono, 2015).

Menurut *American Accounting Association* (AAA) dalam Susanto (2017) menjelaskan akuntansi sebagai sistem informasi yang menghasilkan informasi atau laporan untuk berbagai kepentingan baik individu atau kelompok tentang aktivitas, operasi dan peristiwa ekonomi atau keuangan suatu organisasi. Akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis,

memproses data menjadi suatu laporan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambil keputusan yang akan membuat keputusan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis (Walter & Horngren, 2013).

Akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas dan kondisi ekonomi perusahaan. Selain itu akuntansi juga memberikan informasi untuk pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja perusahaan (Reeve, 2013). Pengertian akuntansi adalah sebagai suatu disiplin yang menyediakan informasi penting sehingga memungkinkan adanya pelaksanaan dan penilaian jalannya perusahaan secara efisien (Soemarso, 2014).

Berdasarkan definisi pengertian akuntansi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan sebuah sistem informasi yang bersangkutan dengan suatu pemeriksaan atau penilaian (evaluasi) terhadap hasil proses dari terlaksananya pembukuan yang menghasilkan suatu laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan.

2.1.1.2. Tujuan Akuntansi

Suatu perusahaan membuat sistem akuntansi yang berguna untuk pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Terdapat beberapa tujuan umum yang sesuai dengan sistem akuntansi yaitu sebagai berikut (Mulyadi, 2016):

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. Kebutuhan pengembangan sistem akuntansi terjadi jika perusahaan baru didirikan atau suatu perusahaan menciptakan usaha baru yang berbeda dengan usaha dijalankan selama ini.

2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada. Adakalanya sistem akuntansi yang berlaku tidak dapat memenuhi kebutuhan manajemen, baik dalam hal mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasi yang terdapat dalam laporan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh perkembangan usaha perusahaan, sehingga menuntut sistem akuntansi untuk penyajiannya dengan struktur informasi yang lebih baik dan tepat penyajiannya dengan struktur informasi yang sesuai.
3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan *intern*, akuntansi merupakan alat pertanggungjawaban suatu organisasi. Pengembangan sistem akuntansi sering kali ditujukan untuk memperbaiki perlindungan terhadap kekayaan organisasi sehingga pertanggung jawaban terhadap penggunaan kekayaan organisasi dapat dipertanggungjawabkan.
4. Untuk mengurangi biaya dalam penyelenggara catatan akuntansi. Pengembangan sistem akuntansi sering kali ditujukan untuk menghemat biaya. Informasi merupakan barang ekonomis, untuk memperolehnya membutuhkan pengorbanan sumber daya ekonomi lainnya.

Sedangkan tujuan dari sistem akuntansi dapat meliputi empat hal yang dijelaskan sebagai berikut (Susanto, 2017):

1. Memberikan data dan informasi yang dapat dipercaya.
2. Memberikan informasi mengenai perubahan yang terjadi pada sumber-sumber ekonomi.
3. Memberikan informasi keuangan yang bisa digunakan memprediksi perusahaan mendapatkan laba.

4. Menyajikan informasi keuangan sedalam mungkin yang berkaitan dengan laporan keuangan sehingga relevan untuk digunakan oleh penggunanya.

2.1.1.3. Manfaat Akuntansi

Terdapat beberapa manfaat dari mempelajari akuntansi dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut (Mulyadi, 2016):

1. Catatan Status dan Kondisi Keuangan

Manfaat mempelajari akuntansi yang pertama adalah laporan keuangan, Laporan keuangan adalah refleksi sebuah perusahaan. Laporan ini akan memperhatikan kinerja perusahaan.

2. Menentukan Tingkat Risiko

Akuntansi penting untuk dipelajari terutama mereka yang nantinya akan bekerja dibidang ekonomi. Salah satu manfaat ketika perusahaan tersebut meminjamkan sejumlah dana untuk kepentingannya dan kita menjadi pihak yang berwenang untuk meninjau dan memberikan keputusan peminjaman atau penolakan ajuan tersebut dilihat dari laporan keuangannya.

3. Dasar Penentuan Pajak

Manfaat lainnya salah satunya digunakan ketika menentukan tingkat pajak. Semakin baik suatu badan usaha yang memiliki track record perkembangan usaha baik dan mapan, maka pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan tingkat pajak yang relatif tinggi dan harus dibayarkan oleh perusahaan.

4. Mengambarkan Kemapanan Usaha

Akuntansi juga bisa membuat orang memiliki kemampuan untuk melihat kemapanan sebuah usaha. Lagi-lagi dilihat dari laporan keuangannya, orang yang mempelajari akuntansi tidak akan kesulitan untuk melihat kondisi dan kesehatan sebuah perusahaan.

5. Dasar Pengambilan Keputusan

Dasar pengambilan keputusan juga harus dilihat dari laporan keuangan. Manfaat ini bukan hanya bisa dilakukan oleh jajaran internal perusahaan tetapi juga pihak eksternal perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan tersebut.

Sedangkan manfaat dari akuntansi dapat dijelaskan menjadi empat yaitu sebagai berikut (Effendi, 2016):

1. Sebagai informasi keuangan untuk pihak yang membutuhkan.
2. Sebagai bahan evaluasi keuangan.
3. Sebagai bukti keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan.
4. Membantu pencatatan ekonomi keluarga.

2.1.2 Piutang

2.1.2.1 Pengertian Piutang

Piutang merupakan komponen aktiva lancar yang penting dalam aktivitas ekonomi suatu perusahaan, karena merupakan aktiva lancar perusahaan yang paling besar setelah kas. Piutang timbul akibat adanya penjualan jasa dan barang secara kredit, bisa juga melalui pemberian pinjaman. Piutang yang dimiliki oleh

perusahaan tersebut harus dikelola dengan baik dan tepat supaya tidak merugikan pihak perusahaan.

Piutang juga aset keuangan yang merupakan instrument keuangan piutang (sering disebut sebagai pinjaman dan piutang) adalah klaim terhadap pelanggan, dan lain-lain untuk uang, barang atau jasa (Kieso et al., 2018). Sedangkan pengertian piutang (*receivable*) mencakup seluruh uang yang diklaim terhadap entitas lain, termasuk perorangan, perusahaan, dan organisasi lain. Piutang-piutang ini biasanya merupakan bagian yang signifikan dari total aset lancar (Warren et al., 2016). Adapun pengertian piutang adalah klaim perusahaan atas uang, barang, atau jasa kepada pihak lain akibat transaksi di masa lalu. Hampir semua entitas memiliki piutang kepada pihak lain baik yang terkait dengan transaksi penjualan atau pendapatan maupun merupakan piutang yang berasal dari transaksi lainnya (Rudianto, 2012).

Pengertian piutang merupakan piutang yang berasal dari penjualan barang ataupun jasa yang merupakan kegiatan usaha normal perusahaan, perusahaan mempunyai hak klaim terhadap seseorang atau perusahaan lain. Dengan adanya hak klaim ini perusahaan dapat menuntut pembayaran dalam bentuk uang atau penyerahan aktiva atau jasa lain kepada pihak siapa yang berpiutang (Soemarso, 2014). Sedangkan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 Tahun 2015 dalam Ikatan Akuntansi Indonesia (2015) menyatakan bahwa pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa piutang adalah tuntutan atau klaim antara pihak yang memperoleh pembayaran dengan pihak yang akan membayar kewajibannya, atau dapat disebutkan sebagai tuntutan kreditur kepada debitur baik perorangan maupun kelompok (badan usaha) akibat penjualan barang dan penyerahan jasa yang dilakukan secara kredit dalam kegiatan usaha normal perusahaan.

2.1.2.2 Klasifikasi Piutang

Piutang yang terjadi di perusahaan dapat diakibatkan oleh berbagai macam transaksi yang terjadi. Pengklasifikasian piutang dilakukan untuk memudahkan pencatatan transaksi yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, klasifikasi mengenai piutang yang ada dalam perusahaan sangat penting dilakukan untuk memudahkan perusahaan dalam mengelola piutangnya. Walaupun terdapat begitu banyak jenis piutang yang mungkin dimiliki oleh suatu perusahaan, akan tetapi berdasarkan jenis dan asalnya piutang dalam perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu sebagai berikut (Rudianto, 2012):

1. Piutang Usaha, yaitu piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang dimiliki perusahaan. Dalam kegiatan normal perusahaan, piutang usaha biasanya akan dibebankan dalam tempo kurang dari satu tahun, sehingga piutang usaha diklompokkan ke dalam kelompok aset lancar.
2. Piutang Bukan Usaha, yaitu piutang yang timbul bukan sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan, yang termasuk dalam kelompok piutang bukan usaha adalah persekot dalam kontrak pembelian, klaim terhadap perusahaan angkutan atau barang yang rusak

atau hilang, klaim terhadap perusahaan asuransi atas kerugian yang dipertanggungjawabkan, klaim terhadap karyawan perusahaan, klaim terhadap retitusi pajak, piutang deviden dan lain-lain.

Sedangkan pengklasifikasian piutang yang dilakukan untuk memudahkan pencatatan transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut (Reeve, 2013):

1. Piutang Usaha (*Account Receivable*)

Piutang usaha yaitu piutang yang berasal dari penjualan barang atau jasa yang merupakan kegiatan usaha normal perusahaan. Piutang ini biasanya dapat ditagih dalam waktu dekat, misalnya 30 atau 60 hari. Piutang ini digolongkan sebagai aset lancar di neraca.

2. Piutang Wesel atau Wesel Tagih (*Note Receivable*)

Piutang wesel atau wesel tagih yaitu jumlah terhutang bagi pelanggan jika perusahaan telah menerbitkan surat hutang formal. Wesel biasanya digunakan untuk jangka waktu yang pembayarannya lebih dari 60 hari. Jika wesel diperkirakan akan tertagih dalam jangka waktu satu tahun, maka dalam neraca wesel diklasifikasikan sebagai aktiva lancar.

3. Piutang Lain-lain

Piutang lain-lain yaitu meliputi piutang bunga, piutang pegawai, dan piutang dari perusahaan. Jika piutang lain-lain diperkirakan dapat ditagih dalam jangka waktu satu tahun maka piutang ini diklasifikasikan sebagai aktiva lancar.

Berdasarkan beberapa klasifikasi piutang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa klasifikasi piutang terdiri dari piutang usaha yang berasal dari kegiatan

penjualan kredit yang dilakukan oleh perusahaan, serta piutang bukan usaha yang timbul bukan sebagai akibat dari penjualan secara kredit melainkan berasal dari piutang wesel, piutang karyawan, piutang deviden dan piutang lain-lain.

2.1.2.3 Metode Pencatatan Piutang

Pencatatan piutang dapat dilakukan dengan beberapa metode yang dapat dijelaskan sebagai berikut (Mulyadi, 2016):

1. Metode konvensional. Dalam metode ini, posting langsung dilakukan berdasarkan data yang dicatat dalam jurnal.
2. Metode posting langsung ke dalam kartu langsung ke dalam kartu piutang atau pernyataan piutang. Metode posting langsung ke dalam kartu piutang dibagi menjadi dua golongan yaitu sebagai berikut:
 - a. Metode posting harian yaitu:
 - 1) Posting langsung ke dalam kartu piutang dengan tulisan tangan, jurnal hanya menunjukkan jumlah total harian saja (tidak rinci).
 - 2) Posting langsung ke dalam kartu piutang dan pernyataan piutang.
 - b. Metode posting periodik yaitu:
 - 1) Posting ditunda.
 - 2) Penagihan bersiklus (*Cycle billing*).
3. Metode pencatatan tanpa buku pembantu. Dalam metode ini, faktur penjualan yang merupakan dasar untuk pencatatan timbulnya piutang di posting langsung setiap hari secara rinci ke dalam kartu piutang. Jurnal penjualan diisi dengan jumlah total penjualan harian (bukan rincian penjualan harian) yang merupakan jumlah faktur penjualan selama satu

hari. Selanjutnya setiap bulan, jurnal penjualan di posting ke akun *control* piutang dalam buku besar. Setiap bulan pula diadakan rekonsiliasi antara *control* piutang dengan neraca saldo yang disusun dari kartu piutang.

4. Metode pencatatan dengan menggunakan komputer. Metode pencatatan piutang dengan komputer yang menggunakan *batch system* dokumen sumber yang mengubah piutang dikumpulkan dan sekaligus diposting setiap hari untuk memutakhirkan catatan piutang. Dalam sistem komputer dibentuk dua macam arsip, arsip transaksi (*transaction file*) dan arsip induk (*master file*). Pencatatan piutang yang dilakukan secara harian disajikan, secara harian arsip transaksi digunakan untuk memutakhirkan arsip induk piutang, secara periodik misalnya bulan arsip induk piutang digunakan untuk menghasilkan berbagai macam laporan bagi manajemen.

2.1.2.4 Kebijakan Pengumpulan Piutang

Di dalam mengumpulkan piutang-piutang perusahaan memerlukan suatu prosedur kebijakan pengumpulan piutang. Sebagian dari efektifitas perusahaan dalam menerapkan kebijakan piutangnya dapat dilihat dari jumlah kerugian piutangnya karena jumlah piutang yang dianggap sebagai kerugian tersebut tidak hanya tergantung pada kebijakan pengumpulan piutang tetapi juga kepada kebijakan-kebijaksanaan penjualan kredit yang diterapkan.

Apabila suatu perusahaan akan mengubah kebijakan manajemen piutang, misalnya diberikan potongan tunai (*cash back*) bagi debitur yang membayar pada suatu periode tertentu, maka akan terjadi perubahan yang dijelaskan sebagai berikut (Nurafiah, 2014):

1. Hari rata-rata pengumpulan piutang (*average collection period*) diharapkan akan berkurang, karena debitur yang tadinya memperoleh potongan tunai, sekarang dapat memanfaatkannya. Hal ini berarti terjadi pembayaran lebih awal sehingga perusahaan akan mempunyai kesempatan lebih awal untuk menggunakan dana tersebut.
2. Kerugian piutang (*bad debts*) diharapkan akan menurun pula karena banyaknya pelanggan yang menggunakan potongan tunai yang ditawarkan perusahaan, maka kerugian piutang akan semakin berkurang sehingga dapat menambah keuntungan perusahaan
3. Aspek negatif dari potongan tunai adalah menurunnya sumber dana yang berasal dari penerimaan piutang bilamana semakin banyak pelanggan yang memanfaatkan potongan tunai yang ditawarkan perusahaan.

2.1.2.5 Teknik Pengumpulang Piutang

Terdapat begitu banyak teknik yang dapat dilakukan dalam pengumpulan piutang. Apabila debitur belum membayar sejumlah piutang yang sudah jatuh tempo maka dapat melakukan cara-cara sebagai berikut (Kasmir, 2017):

1. Melalui Surat Tertulis

Jika debitur belum juga melakukan pembayaran atas piutangnya dan piutang tersebut sudah jatuh tempo maka perusahaan dapat mengirim surat peringatan atas pembayaran piutang yang seharusnya dilakukan.

2. Melalui Telepon

Apabila melalui surat peringatan debitur juga belum melakukan pembayaran maka bagian kredit dapat menghubungi debitur melalui

telepon dan secara pribadi meminta agar segera melakukan pembayaran atas piutang yang ditagih oleh perusahaan.

3. Kunjungan Personal

Teknik pengumpulan piutang dengan jalan melakukan kunjungan langsung secara personal ke tempat debitur seringkali digunakan karena dirasa sangat efektif dalam pengumpulan piutang.

4. Tindakan Yuridis

Perusahaan dapat menggunakan tindakan-tindakan hukum apabila debitur tidak dapat membayar piutang dengan mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan.

2.1.2.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Piutang

Piutang adalah salah satu unsur aktiva lancar dalam neraca yang memiliki perputaran yang cepat (kurang dari 1 tahun). Sebagai salah satu bentuk investasi yang tak berbeda dengan investasi kas, persediaan dan lain-lain. Maka dengan adanya piutang, perusahaan harus menyediakan dana untuk diinvestasikan ke dalam piutang. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya dana yang diinvestasikan dalam suatu piutang dapat dijelaskan sebagai berikut (Riyanto, 2013):

1. Volume Penjualan Kredit

Makin besar jumlah penjualan kredit dari keseluruhan penjualan akan memperbesar jumlah piutang dan sebaliknya makin kecil jumlah penjualan kredit dari keseluruhan piutang akan memperkecil jumlah piutang.

2. Syarat Pembayaran Penjualan Kredit

Semakin panjang batas waktu pembayaran kredit berarti semakin besar jumlah piutangnya dan sebaliknya semakin pendek batas waktu pembayaran kredit berarti semakin kecil besarnya jumlah piutang.

3. Ketentuan dalam Pembatasan Kredit

Apabila batas maksimal volume penjualan kredit ditetapkan dalam jumlah yang relative besar maka besarnya piutang juga semakin besar.

4. Kebijakan dalam Pengumpulan Piutang

Perusahaan dapat menjalankan kebijaksanaan dalam pengumpulan piutang dalam dua cara yaitu pasif dan aktif. Perusahaan yang menjalankan kebijaksanaan secara aktif dalam pengumpulan piutang akan mempunyai pengeluaran uang yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan lain yang menggunakan kebijaksanaanya secara pasif.

5. Kebiasaan Membayar dalam Pelanggan

Semua piutang yang diperkirakan akan terealisasikan menjadi kas dalam setahun di neraca disajikan dalam pada bagian aktiva lancar.

2.1.3 Perlakuan Akuntansi Piutang

2.1.3.1 Pengakuan Piutang

Pengakuan piutang usaha terjadi jika perusahaan menjual produk secara kredit atau memberi jasa namun belum terjadi pembayaran kepada perusahaan. Istilah pengakuan itu sendiri menurut Ikatan Akuntansi Indonesia mengandung

arti proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2017) yang menjelaskan bahwa piutang diakui oleh entitas sebesar nilai wajar. Nilai wajar merupakan harga perolehan atau nilai pertukaran antara kedua belah pihak pada tanggal transaksi. Nilai pertukaran ini dapat dipengaruhi oleh adanya hubungan relasi, karenanya piutang dari pihak berelasi perlu diungkapkan secara khusus. Sedangkan piutang merupakan nilai wajar harga perolehan atau nilai pertukaran antara kedua belah pihak pada tanggal transaksi. Nilai pertukaran ini dapat dipengaruhi oleh adanya hubungan relasi, karenanya piutang dari pihak berelasi perlu diungkapkan secara khusus (Martani, 2015).

Sedangkan pengakuan pendapatan pada umumnya berhubungan dengan pengakuan piutang usaha. Oleh karena pendapatan umumnya dicatat ketika proses menghasilkan selesai dan janji pembayaran yang valid (atau pembayaran itu sendiri) diterima, maka selanjutnya piutang usaha yang timbul dari penjualan barang secara umum ketika kepemilikan barang dialihkan ke pembeli yang dapat dipercaya (Stice et al., 2011).

Tabel 2.1
Ayat Jurnal Untuk Mengakui Piutang Atas Penjualan Barang Atau Jasa

Keterangan	Debet	Kredit
Piutang Dagang	Rp. XXX	
Penjualan		Rp. XXX

Sumber : Data Yang Diolah (2021)

Tabel 2.2
Ayat Jurnal Untuk Mencatat Pembayaran Piutang

Keterangan	Debet	Kredit
Piutang Dagang	Rp. XXX	
Penjualan		Rp. XXX

Sumber : Data Yang Diolah (2021)

Adapun syarat penyerahan barang akan mempengaruhi pengakuan dan perlakuan biaya angkut tersebut, baik bagi pembeli maupun penjualan. Dalam akuntansi terdapat dua syarat penyerahan barang yang dijelaskan sebagai berikut (Mursyidi, 2013):

1. *FOB Destination Point* (bebas sampai ketempat tujuan), artinya hak yang kepemilikan atas barang berpindah ketika barang sudah sampai tempat tujuan, sehingga biaya angkut barang mulai dari gudang penjualan sampai gudang pembeli ditanggung oleh pihak penjual.
2. *FOB Shipping Point* (bebas sampai tempat pengiriman), artinya hak kepemilikan atas bagian berpindah serentak dengan kelurnya barang dari gudang penjual, sehingga biaya angkut barang mulai dari gudang penjual sampai gudang pembeli ditanggung oleh pihak pembeli.

Dengan dasar penilaian ini, piutang dilaporkan sebesar nilai yang diharapkan dapat diterima dari piutang dagang yang bersangkutan. Konsep penilaian yang demikian menunjukkan bahwa aset harus dinilai sebesar manfaat yang akan diterima di masa mendatang. Namun piutang harus tetap disajikan sebesar nilai transaksi yang sebenarnya kemudian disajikan cadangan kerugian piutang dan nilai bersih piutang jika perusahaan menggunakan metode cadangan.

2.1.3.2 Pengukuran/Penilaian Piutang

Pengukuran piutang mencakup kapan diakui dan berapa jumlah piutang dan harus dicatat agar jumlah yang disajikan menunjukkan nilai yang wajar. Pengukuran piutang dilakukan terhadap piutang usaha dan piutang wesel, karena keduanya sering dijumpai dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, dengan adanya pengukuran piutang tersebut maka dapat diketahui dengan tepat nilai wajar piutang yang bersangkutan.

Pengukuran piutang dagang dan piutang usaha, jarang sekali untuk memperhitungkan komponen bunga dari piutang tersebut. Dalam praktiknya, piutang dagang atau piutang usaha jarang mempunyai bunga (Martani, 2015). Sedangkan piutang usaha di nilai pada harga pertukaran awal antara perusahaan dan pihak ketiga, dikurangi penyesuaian untuk diskon, retur penjualan, serta penyisihan dan piutang tak tertagih menghasilkan nilai realisasi bersih, yaitu jumlah kas yang diharapkan akan ditagih (Rosyafah & Pujiyanto, 2013).

Adapun tujuan pelaporan, piutang dinilai sebesar jumlah yang diharapkan dapat diterima. Jumlah ini belum tentu sama dengan jumlah yang secara formal tercantum sebagai piutang. Perbedaan disebabkan perusahaan telah mengurangi, dari jumlah piutangnya, penyisihan terhadap piutangpiutang yang tidak akan tertagih (Soemarso, 2014).

Sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 55, revisi 2014) aset keuangan diukur nilai wajar bagi yang diakui. Nilai wajar sebagai harga yang akan diterima atau harga yang akan dibayar (PSAK No. 68, revisi 2014). Secara teori, semua piutang diukur dalam jumlah yang mewakili nilai

sekarang dari perkiraan penerimaan kas di masa datang. Oleh karena itu, piutang usaha berjangka pendek.

Pencatatan piutang yang tidak tertagih terdapat dua metode yang dapat digunakan yang dijelaskan sebagai berikut (Reeve, 2013):

1. Metode Penghapusan Langsung untuk Piutang Tak Tertagih

Pada metode penghapusan langsung (*direct write-off method*), beban piutang tak tertagih tidak akan dicatat sampai piutang pelanggan dianggap benar-benar tidak bisa ditagih. Pada saat itu, piutang pelanggan akan dihapus. Bila piutang tersebut dapat ditagih, piutang akan dicatat kembali dengan sebuah ayat jurnal yang membalik ayat jurnal penghapusan piutang. Kas yang diterima dalam pembayaran kemudian dicatat sebagai penerimaan atas pembayaran piutang.

a. Ayat jurnal untuk menghapus piutang tak tertagih

Beban Piutang Tak Tertagih	Rp XXX
Piutang Usaha	Rp XXX

b. Ayat jurnal untuk mencatat kembali piutang yang telah dihapus dan penerimaan kas atas pembayaran piutang

Piutang Usaha	Rp XXX
Beban Piutang Tak Tertagih	Rp XXX
Kas	Rp XXX
Piutang Usaha	Rp XXX

2. Metode Penyisihan untuk Piutang Tak Tertagih

Metode penyisihan (*allowance method*) mengestimasi jumlah piutang yang tidak dapat ditagih dan mencatat beban piutang tak tertagih berdasarkan estimasi tersebut setiap akhir periode akuntansi. Berdasarkan estimasi tersebut, beban piutang tak tertagih kemudian dicatat dengan ayat jurnal penyesuaian, yang akan mempengaruhi neraca dan laporan laba rugi. Saat piutang pelanggan diputuskan sebagai tak tertagih, piutang akan dihapuskan langsung ke akun penyisihan piutang tak tertagih. Dalam hal ini, perusahaan harus menghapus jumlah piutang, baik dari akun piutang usaha maupun dari akun penyisihan piutang tak tertagih. Pada akhir periode, penyisihan piutang tak tertagih biasanya akan memiliki saldo (saldo bukan nol) karna akun ini berdasarkan estimasi. Perlakuan untuk piutang yang kemudian dapat ditagih sama halnya dengan metode penghapusan langsung.

- a. Dengan menggunakan estimasi, menggunakan ayat jurnal penyesuaian:

Beban Piutang Tak Tertagih	Rp XXX
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Rp XXX

- b. Ayat jurnal untuk penghapusan piutang:

Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Rp XXX
Piutang Usaha	Rp XXX

2.1.3.3 Penyajian dan Pelaporan Piutang

Untuk tujuan pelaporan, piutang dilaporkan sebesar nilai yang diharapkan dapat diterima dari piutang dagang yang bersangkutan. Konsep penilaian yang

demikian menunjukkan bahwa aset lancar harus dinilai sebesar manfaat yang akan diterima di masa yang akan datang. Namun piutang harus tetap disajikan sebesar nilai transaksi yang sebenarnya (azas bruto) kemudian disajikan cadangan kerugian piutang dan nilai bersih piutang bila perusahaan menggunakan metode cadangan. Dengan cara ini, pembaca dapat mengetahui jumlah bruto piutang usaha dan cadangan penghapusan piutang yang dibuat untuk piutang yang tidak dapat direalisasi.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 9) piutang diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Piutang dinyatakan sebesar jumlah kotor tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Jumlah kotor piutang harus tetap disajikan pada neraca diikuti dengan penyisihan untuk piutang yang diragukan atau taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Pada akhir periode akuntansi, perusahaan akan menyusun laporan keuangan. Piutang merupakan salah satu unsur yang cukup material dari aktiva lancar sehingga pengungkapannya pada neraca harus dilakukan secara tepat dan jelas agar tidak menyesatkan para pemakai laporan keuangan.

Piutang dilaporkan sebesar nilai bersih terealisasi (*net realizable value*), yaitu nilai yang diharapkan dapat dikumpulkan secara tunai. Jumlah ini sama dengan nominal piutang dikurangi dengan jumlah taksiran piutang tak tertagih (Efraim, 2012). Sedangkan piutang dalam laporan posisi keuangan disajikan dalam kelompok aset lancar. Nilai piutang disajikan di laporan posisi keuangan setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Piutang biasanya disajikan dalam satu baris, tetapi dapat juga disajikan secara detail

subkomponennya. Jika disajikan dalam satu baris, maka subkomponennya disajikan dalam catatan atas laporan keuangan (Martani, 2015).

Dalam penilaian, piutang yang disajikan di neraca harus mencerminkan nilai yang dapat direalisasikan atau yang dapat ditagih. Secara umum dalam prinsip akuntansi yang lazim dalam penyajian piutang di neraca adalah sebagai berikut:

1. Piutang dagang harus disajikan didalam neraca sebesar jumlah yang dapat ditagih dari debitur pada tangga neraca. Piutang dagang disajikan didalam neraca dalam jumlah bruto dikurangi dengan taksiran kerugian tidak tertagihnya piutang.
2. Bila perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian piutang dagang, harus dicantumkan penjelasannya didalam neraca bahwa saldo piutang dagang tersebut adalah jumlah bersih (*netto*).
3. Jika piutang dagang bersaldo material pada tanggal neraca harus disajikan rinciannya didalam neraca.
4. Piutang dagang yang bersaldo kredit (terdapat didalam kartu piutang pada tanggal neraca harus disajikan dalam kelompok utang lancar).
5. Jika jumlahnya material, piutang nondagang harus disajikan terpisah dari piutang dagang.

Pelaporan piutang seharusnya dilakukan yaitu: Penyajian piutang dagang di dalam laporan posisi keuangan dipisahkan dengan pos-pos piutang yang lain. Contoh penyajian pos piutang dagang dalam laporan posisi keuangan yaitu sebagai berikut (Mardiasmo, 2016):

Piutang usaha (bruto)	Rp xxx
Dikurangi: Cadangan kerugian piutang	<u>(Rp xxx)</u>
Piutang usaha (netto)	Rp xxx

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa nilai piutang yang disajikan di laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai bersih piutang. Nilai bersih piutang yang didapat dihitung dengan cara mengurangi antara jumlah bruto piutang dengan cadangan kerugian piutang. Sehingga dalam hal penyajian di laporan posisi keuangan, piutang yang dilaporkan telah menunjukkan nilai sesungguhnya dari jumlah piutang bersih yang ada.

2.1.3.4 Kerugian Piutang Tak Tertagih

Piutang tak tertagih merupakan hal penting karena sebagian pelanggan mungkin tidak akan membayar hutang mereka. Dengan demikian, sebagian piutang menjadi tak tertagih. Oleh sebab itu penjualan kredit mempunyai resiko bagi perusahaan seperti pelanggan tidak sanggup membayar tepat waktu atau penundaan pembayaran. Tidak ada aturan umum untuk menentukan kapan sebuah piutang dianggap tidak tertagih.

Piutang usaha tak tertagih adalah kerugian pendapatan yang memerlukan, melalui ayat jurnal pencatatan yang tepat dalam akun, penurunan aktiva piutang usaha serta penurunan yang berkaitan dengan laba dan ekuitas pemegang saham. Kerugian pendapatan dan penurunan laba diakui dengan mencatat beban piutang ragu-ragu (atau beban piutang tak tertagih). Beban piutang tak tertagih merupakan biaya bagi penjual yang memberikan kredit (Belkaoui, 2015).

Terdapat beberapa indikasi bahwa suatu piutang tidak dapat tertagih, diantaranya adalah saat piutang sudah jatuh tempo, pelanggan tidak menanggapi usaha perusahaan untuk menagih, pelanggan pailit, usaha pelanggan tutup, kegagalan dalam mencari lokasi atau menghubungi pelanggan (Warren et al., 2016). Oleh karena itu, terdapat beberapa metode piutang tak tertagih yang dapat dijelaskan sebagai berikut (Warren et al., 2016):

1. Metode Penghapusan Langsung

Metode langsung mencatat beban piutang tak tertagih hanya pada saat suatu piutang dianggap benar-benar tak tertagih

2. Metode Cadangan

Metode penyisihan mencatat beban piutang tak tertagih dengan mengestimasi jumlah piutang tak tertagih pada akhir periode akuntansi. Berdasarkan estimasi tersebut, beban piutang tak tertagih kemudian dicatat dengan ayat jurnal penyesuaian. Sebagai ilustrasi, diasumsikan bahwa perusahaan memulai operasinya pada bulan Agustus dan memilih menggunakan tahun kalender sebagai tahun fiskalnya.

2.1.3.5 Estimasi Piutang Tak Tertagih

Terdapat langkah-langkah untuk menekankan penilaian piutang usaha pada nilai bersihnya yang dapat direalisasi, yang nantinya akan dilaporkan dalam neraca atau dengan kata lain cara ini fokus pada penentuan figure piutang usaha yang secara nyata dapat ditagih (Hery, 2015). Adapun langkah-langkah tersebut dapat dibagi kedalam dua metode yang dapat dijelaskan sebagai berikut (Hery, 2015):

1. Berdasarkan Pada Persentase

Pada metode ini, persentase dari jumlah saldo akhir piutang usaha yang diestimasi tidak dapat ditagih ditentukan. Saldo awal akun cadangan piutang tak tertagih akan disesuaikan jumlahnya agar supaya menghasilkan saldo akhir yang nilainya sama dengan hasil persentase ini.

2. Metode Umur Piutang

Metode umur piutang pertama kali, piutang usaha akan dikelompokkan berdasarkan pada masing-masing karakteristik umurnya, yang artinya adanya pengelompokan piutang usaha ke dalam kategori berdasarkan atas tanggal jatuh tempo piutang.

Tabel 2.3
Karakteristik Umur Piutang

Umur Piutang	Persentase
Belum Jatuh Tempo	2%
Sudah jatuh tempo 1-30 hari	5%
Sudah jatuh tempo 31-60 hari	10%
Sudah jatuh tempo 61-90 hari	20%
Sudah jatuh tempo 91-180 hari	30%
Sudah jatuh tempo 181-365 hari	50%
Sudah jatuh tempo diatas 365 hari	80%

Sumber: Hery (2015)

Lamanya umur piutang yang sudah jatuh tempo ini adalah lamanya hari mulai saat piutang tersebut jatuh tempo hingga laporan umur piutang (*aging schedule*) dibuat. Berdasarkan umur piutang, piutang yang sudah lama beredar (jatuh tempo) sangat kecil kemungkinan untuk bisa ditagih.

2.1.3.6 Pengendalian Piutang

Pengendalian pemberian kredit (hutang) bertujuan agar hutang yang diberikan tepat sasaran, sehingga tidak terjadi masalah yang dapat menimbulkan kerugian *financial* bagi suatu perusahaan. Dalam hal ini manajemen harus mampu menilai calon pelanggan, sehingga dapat mencegah timbulnya piutang tak tertagih. Secara umum, untuk menilai berhak atau tidaknya suatu pelanggan memperoleh kredit (hutang) maka dalam hal ini pihak manajemen harus memperhatikan beberapa aspek yaitu sebagai berikut (Kasmir, 2017):

1. *Character* (Kepribadian)

Pengertian karakter adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada perusahaan bahwa, sifat dan watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Adalah suatu pendapat subjektif tentang kemampuan pelanggan untuk membayar kredit. Kemampuan ini dapat diukur dengan prestasi bisnis pelanggan dimasa lalunya, didukung dengan observasi dilapangan atas pabrik atau toko dan metode kegiatan usahanya.

3. *Capital* (Modal)

Diukur dengan posisi keuangan perusahaan secara umum yang disimpulkan dari analisis rasio keuangan dengan penekanan khusus pada kekayaan bersih yang terwujud.

4. *Collateral* (Jaminan)

Diberikan oleh pelanggan dalam bentuk jaminan aktiva sebagai jaminan keamanan kredit yang diberikan.

5. *Condition of Economy* (Kondisi)

Pengaruh perekonomian secara umum terhadap perusahaan atau perkembangan khusus di sektor ekonomi tertentu yang mungkin berpengaruh terhadap kemampuan pelanggan untuk memenuhi hutangnya.

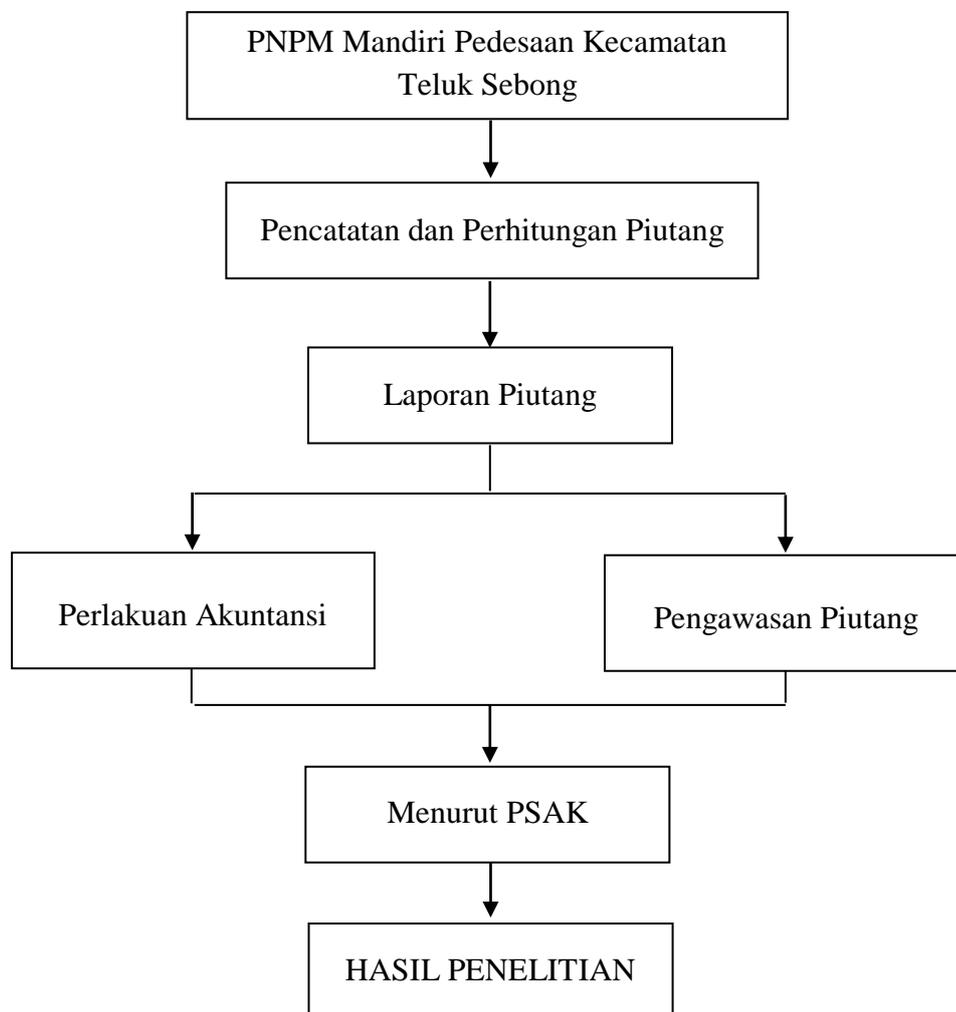
2.2 **Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir penulis yang dijadikan sebagai skema pemikiran atau dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat indikator yang melatar belakangi masalah yang ingin diteliti. Dalam kerangka pemikiran ini didapatkan dari konsep ilmu atau teori-teori yang relevan sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti.

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang akan diteliti. Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2018) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Sedangkan menurut Suriasumantri dalam Sugiyono (2018) yang menjelaskan bahwa kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan.

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kerangka berpikir adalah penjelasan sementara secara konseptual tentang keterkaitan hubungan pada setiap objek permasalahan berdasarkan teori. Adapun kerangka pemikiran yang terdapat dalam penelitian ini dapat dirumuskan seperti gambar sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Konsep Yang Dikembangkan (2021)

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu referensi yang berkaitan serta relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan demikian, peneliti mendapatkan rujukan pendukung, pelengkap serta pembanding dalam menyusun penelitian ini sehingga lebih memadai. Selain itu, telaah pada penelitian terdahulu berguna untuk memberikan gambaran awal mengenai kajian terkait dengan masalah dalam penelitian ini.

1. Ganing (2018)

Jurnal Nasional berjudul “Analisis Pengakuan dan Pengukuran Piutang Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan akuntansi piutang pendapatan yang terjadi di Pemerintah Kota Palopo dengan kesesuaian pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah sehingga dapat ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan dan pengukuran piutang pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palopo telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dimana piutang pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi dan kas atau setara kas atas pendapatan tersebut belum diterima direkening kas umum daerah sedangkan piutang pendapatan diukur sebesar nilai nominal piutang yang belum dilunasi. Adapun penyajian akuntansi piutang pada Pemerintah Kota Palopo telah sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dimana piutang yang berasal dari peraturan undang-undang disajikan di neraca sebagai aset lancar.

2. Sihombing (2018)

Jurnal Nasional berjudul “Perlakuan Akuntansi Untuk Koperasi Simpan Pinjam Atau Unit Simpan Pinjam”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dan kualitatif yang akan memberikan gambaran mengenai proses perlakuan akuntansi yang benar untuk setiap tahapan akuntansi koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam mulai dari proses pencatatan hingga penyajian laporan keuangan. Objek penelitian ini adalah perlakuan akuntansi untuk koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam Bintang Fajar. Sedangkan subjek penelitian adalah pimpinan dan karyawan koperasi simpan pinjam Bintang Fajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Bintang Fajar belum menerapkan sistem akuntansi yang benar sesuai dengan PSAK Nomor 27 tentang Pedoman Akuntansi Koperasi, mulai dari tahap pencatatan sampai tahap penyajian laporan keuangannya, sehingga pengelolaan keuangannya belum maksimal.

3. Hati & Nababan (2014)

Jurnal Nasional berjudul “Perlakuan Akuntansi Terhadap Piutang Pada Unit Bisnis Infrastruktur PT. PLN Batam”. Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif, dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi terhadap piutang pada Unit Bisnis Infrastruktur

PT. PLN Batam mencakup pengakuan piutang, pencatatan piutang, penilaian piutang, dan penyajian piutang belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pengakuan piutang yang dilakukan Unit Bisnis Infrastruktur PT. PLN Batam belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU). Unit Bisnis Infrastruktur PT. PLN Batam hanya mengakui penggunaan tiang listrik pada saat pelunasan saja. Kedua, pencatatan akuntansi terhadap piutang pada Unit Bisnis Infrastruktur PT. PLN Batam belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU). Unit Bisnis Infrastruktur PT. PLN Batam tidak melakukan pencatatan jurnal pada saat piutang terjadi. Ketiga, Unit Bisnis Infrastruktur PT. PLN belum melakukan pencatatan berupa jurnal yang dibutuhkan dalam pengakuan, pencatatan dan penilaian.

4. Andrayanti (2021)

Jurnal Internasional berjudul “*Analysis of Internal Control of the Accounts Receivable System at Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (STIAMI)*”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik yaitu menganalisis dan membahas masalah yang akan diuraikan, penjelasan dan ilustrasi disusun secara sistematis, obyektif dan relevan berdasarkan data yang dikumpulkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif analitik untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian internal dan sistem akuntansi akun. Untuk mendapatkan informasi secara langsung dari pihak-pihak terkait, peneliti

melakukan wawancara mendalam dengan Pengurus STIAMI. Berdasarkan hasil penelitian, pengendalian internal sistem akuntansi piutang yang diterapkan oleh STIAMI cukup efektif, hal ini ditandai dengan independensi komite audit atau unit pengawas internal yang berada langsung di bawah naungan ketua STIAMI. Selain itu, manajemen juga telah menerapkan konsep dasar dan prinsip pengendalian internal STIAMI.

5. Renaldo et al. (2020)

Jurnal Internasional berjudul "*Internal Control System Analysis On Accounts Receivable In Sp Corporation*". Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui efektivitas pengendalian internal piutang pada SP Corporation. Permasalahannya adalah ada piutang usaha yang masih beredar dan pada akhir tahun 2013-2019 piutang tersebut akan dihapuskan. Teori model utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah COSO (*Committee of Sponsoring Organization*) untuk mengetahui efektivitas pengendalian internal. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan uji tanda. Kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan uji tanda menunjukkan bahwa pengendalian internal piutang pada SP Corporation tidak berjalan efektif. SP Corporation belum menerapkan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, dan pengawasan dan pemantauan secara efektif.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan dan melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta. Penelitian ini merupakan usaha untuk mengungkapkan masalah atau keadaan sebagaimana adanya sehingga hanya bersifat sebagai pengungkap fakta (Moleong, 2016).

Metode penelitian kualitatif atau biasa disebut metode naturalistik adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2018). Dengan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian yang dilakukan dapat menghasilkan temuan atau data yang lebih lengkap, mendalam, realibilitas dan validitas sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai.

3.2. Jenis Data

Pengertian data adalah sekumpulan informasi, fakta-fakta, atau simbol-simbol yang menerangkan tentang keadaan objek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, data penelitian dapat diperoleh dari berbagai sumber yang dikumpulkan

dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian tersebut berlangsung (Arikunto, 2016).

Adapun sumber data adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber asli, yang terdiri dari (Sugiyono, 2018):

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari badan usaha (pihak internal perusahaan) berupa data dan informasi yang relevan dengan penelitian, melalui observasi maupun wawancara dengan pihak informan. Metode pengambilan data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara observasi dan wawancara mendalam dengan bendahara PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Teluk Sebong.
2. Data Sekunder, adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan yang telah dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari pihak internal maupun eksternal perusahaan, yaitu didapatkan dari data piutang pada PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Teluk Sebong, literatur-literatur dan penelitian terdahulu, serta informasi lain yang mendukung penelitian.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada

kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi (Sugiyono, 2018).

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data langsung dari sumber data, sebagai perbandingan untuk memperoleh keterangan-keterangan dan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Teknik pengumpulan data yang peneliti maksud dilakukan dengan menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dimana peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi bertujuan untuk mengamati subjek dan objek penelitian, sehingga peneliti dapat memahami kondisi yang sebenarnya (Sugiyono, 2018). Dimana penulis mengadakan pendekatan langsung guna mengetahui kondisi lokasi penelitian, sehingga dapat diketahui budaya organisasi terhadap pencatatan dan pengawasan piutang pada PNPM Mandiri Teluk Sebong.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dengan maksud tertentu. Pertemuan itu dilakukan oleh dua pihak atau lebih (pewawancara dan narasumber) untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tersebut. Dengan melakukan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang informasi dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang

terjadi (Moleong, 2016). Yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan bagian administrasi dan keuangan PNPM Mandiri Teluk Sebong.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel apabila didukung oleh dokumen-dokumen tertulis dan dianggap relevan dengan masalah yang diteliti (Arikunto, 2016). Yaitu dengan melakukan pengutipan secara langsung data-data PNPM Mandiri seperti struktur organisasi, laporan keuangan serta dokumen-dokumen terkait yang relevan dengan topik yang diteliti.

3.4. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengolahan data yang digunakan oleh peneliti adalah model interaktif yang dikemukakan oleh Miles and Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2018). Adapun prosedur perolehan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data yang peneliti peroleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam uraian laporan lengkap dan terperinci. Laporan lapangan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal penting kemudian dicari tema atau polanya agar mudah dalam menyajikannya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian yang baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid dilengkapi dengan jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk uraian teks naratif, dan didukung oleh dokumen-dokumen, serta foto-foto maupun gambar sejenisnya untuk diadakannya suatu kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian yang sedang berlangsung, yaitu selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan. Dalam penelitian ini,

penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara.

3.5. Teknik Analisis Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan sekaligus untuk menguji data yang ingin diperoleh (Sugiyono, 2018). Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah, maka perlu dilakukan uji keabsahan data sebagai berikut :

1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

a. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas atau kepercayaan data. Sehingga dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap. Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh.

Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan atau benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol atau mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

c. Triangulasi

- 1) Triangulasi Sumber, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data.
- 2) Triangulasi Teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang

berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

- 3) Triangulasi Waktu, data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

d. Menggunakan Bahan Referensi

Referensi merupakan pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

2. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian yang apabila dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan

audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

3. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian dapat dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrayanti, I. (2021). *Analysis of Internal Control of the Accounts Receivable System at Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (STIAMI)*. 18, 395–403.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (15th ed.). Rineka Cipta.
- Belkaoui, A. R. (2015). *Teori Akuntansi*. Salemba Empat.
- Effendi, M. A. (2016). *The Power of Good Corporate Governance (Teori dan Implementasi)*. Salemba Empat.
- Efraim, F. G. (2012). *Akuntansi Keuangan Menengah 1* (1st ed.). UPP STIM YKPN.
- Ganing, P. (2018). *Analisis pengakuan dan pengukuran piutang pendapatan badan pendapatan daerah kota palopo*. 05(02), 29–45.
- Hati, S. W., & Nababan, Y. (2014). *Perlakuan Akuntansi Terhadap Piutang Pada Unit Bisnis Infrastruktur PT PLN Batam*. 2(2), 240–247.
- Hery. (2015). *Auditing (Pemeriksaan Akuntansi I)* (1st ed.). CAPS.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2015). *PSAK No. 1 Tentang Laporan Keuangan - Edisi Revisi*. PT. Raja Grafindo.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2017). *Standar Akuntansi Keuangan (SAK)*. Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Kasmir. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. PT. Raja Grafindo.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2018). *Intermediate Accounting (IFRS Edition)* (2nd ed.). WILEY.
- Mardiasmo. (2016). *Akuntansi Keuangan* (2nd ed.). BPF.
- Martani, D. (2015). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Universitas Indonesia.
- Moleong, L. J. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. (2016). *Akuntansi Biaya* (5th ed.). UPP STIM YKPN.

- Mursyidi. (2013). *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. PT. Refika Aditama.
- Reeve, J. M. (2013). *Pengantar Akuntansi*. Salemba Empat.
- Renaldo, N., Sudarno, & Hutahuruk, M. B. (2020). *Internal Control System Analysis On Accounts Receivable In Sp Corporation*. 05(02), 73–84. <https://doi.org/10.33062/ajb.v5i2.382>
- Riyanto, B. (2013). *Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan* (4th ed.). BPFE.
- Rudianto. (2012). *Pengantar Akuntansi*. Erlangga.
- Sihombing, S. (2018). *Perlakuan Akuntansi Untuk Koperasi Simpan Pinjam Atau Unit Simpan Pinjam*. 4(21132).
- Soemarso, R. (2014). *Akuntansi Suatu Pengantar* (5th ed.). Salemba Empat.
- Stice, E. K., Stice, J. D., & Skousen, F. (2011). *Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Susanto, A. (2017). *Sistem Informasi Akuntansi - Pemahaman Konsep Secara Terpadu* (1st ed.). Lingga Jaya.
- Suwardjono. (2015). *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan* (3rd ed.). BPFE.
- Walter, H., & Horngren, C. (2013). *Akuntansi Keuangan* (7th ed.). Erlangga.
- Warren, C. S., Reeve, J. M., & Duchac, J. E. (2016). *Accounting*. Cengage Learning.

CURRICULUM VITAE



Nama : Ulfah Khairina

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir : Tanjungpinang, 27 April 1996

Status : Belum Menikah

Agama : Islam

Email : ulfahkhairina@gmail.com

Alamat : Jl. Sultan Machmud Gg. Tumu No.1

Pendidikan : - SD Negeri 007 Bukit Bestari
- SMP Negeri 2 Tanjungpinang
- SMK Negeri 3 Tanjungpinang
- STIE Pembangunan Tanjungpinang